

## Strategi Sultan Thaha Syaifuddin dalam Melawan Penetrasi Belanda di Kesultanan Jambi (1855-1904)

Ratih Ummi Rosyadi<sup>1</sup>, Didik Pradjoko<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa/ Universitas Indonesia

Correspondence Email: ratih.ummi11@ui.ac.id

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang strategi perlawanan Sultan Thaha menghadapi Belanda pada tahun 1855-1904 melalui upaya gerilya sehingga menjadi salah satu perlawanan rakyat yang memakan waktu cukup lama sebelum Jambi berhasil ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1906. Sejak perubahan arah politik imperialisme Belanda di Nusantara pasca ditandatanganinya Traktat London 1824, intervensi Inggris mengakibatkan Belanda harus meninjau ulang kontrak-kontrak penguasa lokal untuk menjamin kedaulatan mereka di Nusantara. Sultan Thaha sebagai Sultan Kerajaan Melayu Jambi berusaha melepaskan ikatan kontrak dengan Belanda dengan perlawanan secara fisik dan diplomasi terhadap hegemoni kekuatan Belanda yang semakin mendesak Jambi untuk tetap tunduk. Hal ini yang kemudian menjadi topik permasalahan penulis bagaimana upaya dan strategi yang dilancarkan oleh Sultan Thaha dalam mempertahankan Jambi ditengah desakan yang terus dilancarkan Belanda. Penulis mencoba merekonstruksi kembali menggunakan metode sejarah untuk mengungkap bagaimana langkah yang diambil Sultan Thaha dalam mencari dukungan rakyat dan strategi-strategi yang digunakan untuk mempertahankan Jambi dari penetrasi Belanda.

**Kata Kunci:** Kesultanan Jambi, Strategi, Sultan Thaha

**Abstract:** *This research discusses the resistance strategy of Sultan Thaha against the Dutch in 1855-1904 through guerrilla efforts so that it became one of the people's resistances which took quite a long time before Jambi was successfully conquered by the Dutch in 1906. Since the political direction of Dutch imperialism changed in the archipelago after the signing of the Treaty of London in 1824, British intervention resulted in the Dutch having to review local authority contracts to guarantee their sovereignty. Sultan Thaha as the Sultan of the Jambi Kingdom tried to break the contractual ties with the Dutch by physically and diplomatically resisting the hegemony of the Dutch power which increasingly urged Jambi to remain submissive. This became the topic of the writer's problem about the efforts and strategies launched by Sultan Thaha in defending Jambi amid the pressure that the Dutch continued to make. The author tries to reconstruct using historical methods to reveal how the steps taken by Sultan Thaha in seeking people's support and the strategies used to defend Jambi from Dutch penetration.*

**Keywords:** *Jambi Sultanate, Strategy, Sultan Thaha.*

### PENDAHULUAN

Memasuki abad ke-19, kolonialisme dan imperialisme yang dilancarkan pemerintah Hindia Belanda mulai bertransformasi ke arah perluasan wilayah yang tidak lagi hanya terfokus pada pulau Jawa, melainkan juga mulai menaklukkan satu persatu kerajaan-kerajaan di Nusantara agar tunduk kepada Belanda melalui kontrak-kontrak dan perjanjian. Negeri Pesako nan Betuah, atau Jambi menjadi target penaklukkan selanjutnya setelah Belanda berhasil sepenuhnya menguasai Palembang pada tahun 1825.

Sejarah hubungan Jambi dan Belanda sebenarnya sudah dimulai jauh sebelumnya, yakni ketika VOC masih berjaya di kepulauan nusantara. Dibawah komando Gubernur Jendral Jan Pieterzoon Coen, dikirimkanlah dua perwakilan kapal dibawah pimpinan *opperkoopman* Stecrk pada tahun 1615 untuk bernegosiasi dan menyelidiki kemungkinan untuk melakukan perdagangan di Jambi yang membuahkan hasil dibukanya perwakilan kantor dagang VOC di Muara Kumpeh (Masjkuri, 1985). Kekayaan Jambi pada masa itu tidak diragukan lagi karena pada tahun 1616, Jambi menjadi salah satu kerajaan terkaya setelah Aceh atas perdagangan palanya yang terkenal (Marsden, 2016).

Namun seiringnya waktu, intervensi Belanda dalam perdagangan pala di Jambi justru mulai ikut campur tangan dan merambah ke bidang lainnya, seperti politik dan pemerintahan. Belanda ikut campur tangan dalam perihal suksesi tahta dan perselisihan internal dikalangan istana sehingga dapat memperkuat posisi Belanda dalam keberlangsungan pemerintahan Kerajaan Jambi. Pada awalnya, bentuk penolakan rakyat masih belum menggunakan senjata, yakni dengan

memonopoli perdagangan dan komoditi. Namun cara ini tidak menggertak Belanda sehingga kemarahan rakyat memuncak pada tahun 1690, dengan dibakarnya kantor dagang VOC di Muara Kumpeh dan dibunuhnya kepala kantor Sybandt Swart beserta jajaran pegawainya. Sayangnya akhir pemberontakan tersebut membawa kemalangan dari Jambi yang menunjukkan masih “inferior”nya Kerajaan Jambi dibawah tangan Belanda. Belanda menunjuk Sultan Jambi yang berkuasa saat itu, Sultan Kiai Gede sebagai pihak yang bertanggung jawab dan di bawa ke Batavia sebelum kemudian diasingkan ke Pulau Banda (Amran, 2018).

Sejak itu Kerajaan Jambi tunduk kepada Belanda dengan mengadakan kontrak perjanjian yang menunjukkan superioritas Belanda atas negeri Jambi. Hingga tahun 1833, dibawah pemerintahan Sultan Muhammad Fakhruddin, ayah Sultan Thaha, juga sempat mengadakan pemberontakan kepada Belanda, yang sayangnya justru menjerumuskan Jambi lebih dalam dibawah cengkraman Belanda dibawah perjajian Sungai Baung 1833 yang menutup semua kontrol Sultan atas pemerintahan di Jambi. Kontrak inilah yang selalu diperbaharui ketika sultan baru menjabat, termasuk pada masa Sultan Thaha Syaifuddin.

Gelar Syaifuddin yang bermakna “pedang agama” yang disematkan pada Thaha oleh Sultan Aceh semasa ia menempa ilmu di Aceh menjadikan beliau sosok Sultan Jambi yang sangat menentang keras penetrasi Belanda di Tanah Besako nan Betuah hingga akhir hayatnya. Tak heran Sultan terakhir Jambi ini menjadi salah sosok patriotisme masyarakat Jambi bahkan hingga kini. Thaha lahir di Keraton Tanah Pilih pada tahun 1816 dengan nama Thaha Jayadiningrat. Semasa kecil ia sering dipanggil dengan nama Thaha Ningrat.

Ayahnya, Sultan Muhammad Fakhruddin, merupakan sosok yang taat agama dan ajaran Islam sehingga pendidikan agama bagi putra-putrinya menjadi suatu kewajiban. Thaha mengenyam pendidikan agama sejak dini seperti menghafal Al-Quran dan ilmu-ilmu keterampilan seperti beladiri, berburu dan menunggang kuda. Dalam pendidikan islamnya, Thaha dikirim ke Aceh dikarenakan hubungan yang baik antara Jambi dan Aceh dan juga dikarenakan Aceh merupakan wilayah yang memiliki pengaruh Islam terkuat disamping Sumatera Barat dan Banten (Yullianti dkk, 2019).

Dikarenakan pendidikan sejak dini yang ditanamkan, Thaha menjadi sosok yang melek huruf sejak usia dini sehingga beliau telah mampu untuk membaca situasi politik yang terjadi di tanah melayu, seperti Aceh, Johor, Palembang, bahkan hingga kondisi perpolitikan di Kesultanan Turki Usmani (Fachruddin, 2008). Ditambah selama menempuh pendidikan di Aceh juga membangkitkan pemahaman beliau akan penetrasi Belanda yang semakin menekan kesultanan-kesultanan di Nusantara, seperti halnya juga yang terjadi di Kesultanan Aceh pada saat itu. Pemahaman ini yang kemudian membentuk karakteristik perjuangan beliau terhadap Belanda yang juga dapat dinilai sebagai bentuk *jihad fisabilillah* (berjuang di jalan Allah), dengan upaya menolak segala bentuk hubungan negosiasi dan perjanjian yang dilancarkan oleh orang-orang kafir yakni Belanda (Masjkuri, 1985).

Kepala Residen Palembang, Corperus menyebutkan bagaimana sosok Sultan Thaha di mata belanda sebagai *ten volle vijand dan ten volle trouw* yakni musuh yang sangat keras kepala tetapi memegang teguh komitmen yang telah ia ucapkan. Kepada Belanda ia terkenal keras tetapi kepada siapapun yang dianggap sebagai sekutu, Thaha merupakan sosok yang loyal dan bertanggung jawab, terutama kepada sekutu yang membantu Jambi dari tangan Belanda (Locher-Scholten, 2004).

Upaya dan strategi Sultan Thaha ini yang kemudian menjadi kajian menarik untuk dibahas, mengingat dari kondisi diatas bagaimana penetrasi kekuatan Belanda di Kerajaan Jambi yang telah kuat mengakar akibat kontrak yang telah berlangsung beratus tahun yang lalu sebelum diangkatnya Thaha sebagai Sultan. Disisi lain juga Jambi menjadi salah satu kerajaan yang baru dapat ditaklukkan oleh Belanda setelah abad ke-20, tepatnya pada tahun 1907 sebelum bergabungnya Jambi di Karesidenan Palembang juga perlu diperhitungkan dalam strategi Thaha untuk melawan kekuatan Belanda yang jauh diatas Jambi pada saat itu. Kepiawaiian beliau dalam

membaca situasi politik yang terjadi menjadi salah satu kekuatan beliau dalam melawan Belanda, yakni dengan strategi diplomatis.

Pada tahun 1855 ketika Thaha dinobatkan sebagai Sultan Jambi, perwakilan Belanda melalui Residen Palembang mengirimkan delegasi untuk memperbaharui kontrak baru dengan Jambi. Namun sikap non-kooperatif Sultan Thaha kepada Belanda ditunjukkan dengan kepiawaian strategi yang di luncurkan oleh sang Sultan dengan menjalin hubungan diplomasi dengan Turki, Inggris, bahkan Amerika yang saat itu bersitegang dengan Belanda atas supremasi imperialisme modern yang menjadi isu hangat di eropa. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melihat bagaimana strategi dan upaya perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Thaha terhadap Belanda sebelum kerajaan Jambi takluk pada tahun 1907.

## **LANDASAN TEORI**

### **A. Sultan Thaha Saifuddin**

Ditinjau dari garis keturunannya Sultan Thaha Saifuddin merupakan anak dari Sultan Muhammad Fachruddin yang bila di teliti ke atas silsilahnya bermoyangkan Orang Kayo Hitam, anak Ahmad Salim dengan gelar Datuk Paduko Berhalo dengan Putri Selaras Pinang Masak. Sultan Thaha Saifuddin lahir dilingkungan Istana Tanah Pilih Kampung Gedang di kerajaan Jambi tahun 1816 M. Ketika Sultan Thaha Saifuddin masih kecil dia diberi nama Raden Thaha Ningrat, dia dibesarkan dan dididik di lingkungan istana serta dipersiapkan menjadi seorang pemimpin. Jadi, sejak kecil Raden Thaha Ningrat sudah memiliki keberanian dan jiwa seorang pemimpin. Dalam mengambil keputusan, ia tidak memerintah sewenang-wenangnya tapi memperhatikan nasehat bawahannya. Raden Thaha Saifuddin juga cerdas dan pandai mengatur strategi dalam melawan Belanda. Selama perjalanan hidup dan perjuangannya melawan Belanda, Raden Thaha Saifuddin sering mengunjungi dusun-dusun dan memberi ceramah dan khotbah jum'at. Melalui khotbah jum'at itulah Raden Thaha Saifuddin menambah semangat juang serta keimanan kepada rakyat. Rakyatnya dengan ikhlas turut serta melawan Belanda dan membangun benteng-benteng pertahanan. Disinilah letak kekuatan/pertahanan sesungguhnya pasukan Raden Thaha Saifuddin.

Pada tahun 1834 M, Raden Thaha meninggalkan daerah Jambi menuju Aceh guna menambah pengetahuannya dalam ilmu-ilmu keagamaan dan pengetahuan umum, diantaranya belajar politik dan militer, karena saat itu Aceh merupakan daerah di Indonesia yang kuat berpegang teguh kepada agama Islam di samping daerah Minangkabau dan Banten. Selain itu, Aceh juga merupakan Negara yang menggunakan sistem politik dan militer yang sangat bagus. Sekembalinya Raden Thaha Saifuddin dari Aceh, Ia mengadakan hubungan dengan luar negeri yaitu Negara-negara yang bersedia menjual hasil industri perangnya. Selain itu, Raden Thaha juga berhasil membentuk pasukan Sabilillah yang dilatih oleh pelatih-pelatih dari Aceh. Dalam hal ini, Raden Thaha menerapkan ilmu-ilmu politik dan militer yang Ia dapatkan dari Aceh sehingga terbentuklah "Pasukan Komando". Di Aceh, Raden Thaha tinggal selama dua tahun dan ketika Ia hendak pulang ke Jambi, oleh sultan Aceh diadakanlah upacara pelepasan yang ditandai dengan pemberian gelar "Saifuddin" yang artinya "Pedang Agama". Setelah selesai menuntut ilmu pengetahuan Raden Thaha Ningrat kembali ke Jambi dengan membawa gelar Saifuddin, gelar ini tetap melekat sehingga tidak terdengar lagi panggilan Raden Thaha Ningrat tetapi Raden Thaha Saifuddin.

Pada tahun 1855 M, Sultan Abdurrahman Nasrudin (pemimpin Kerajaan Jambi) yang merupakan paman dari Pangeran Ratu Thaha Saifuddin wafat, kedudukan pemerintahan digantikan Ratu Thaha Saifuddin dengan gelar Sultan Thaha Saifuddin. Perlawanan beliau pada Belanda dibuktikan dengan penolakan terhadap kekuasaan Belanda dan menjalin kerja sama dengan negara-negara lain seperti Turki, Inggris dan Amerika untuk memperoleh bantuan senjata yang akan di manfaatkan untuk menyerang Belanda. Sultan Thaha Saifuddin meninggal dunia dalam sebuah peperangan melawan Kolonial Belanda di Betung Berdarah pada tanggal 27

April 1904 M, dengan pedang masih tergenggam di tangan, hal ini disebabkan beberapa tembakan tepat di dada Sultan Thaha Saifuddin. Perjuangan dan nilai perjuangan anak dari Sultan Fachruddin tersebut diakui oleh negara. Terpatrilah gelar Pahlawan Nasional pada sosok Sultan Thaha Saifuddin sebagaimana tertera dalam surat keputusan Presiden RI tanggal 24 Oktober 1977 No. 079/TK/1977.

## **B. Kolonial Belanda**

Pada abad ke-16 M mulai terdapat suasana baru di perairan Indonesia, yaitu kedatangan bangsa Eropa diantaranya Portugis dan Belanda. Pada awalnya kedatangan orang-orang Portugis tersebut disambut dengan baik oleh Sultan Mahmud Syah (Malaka), tetapi komunitas Islam Internasional yang ada di kota itu meyakinkan Mahmud bahwa Portugis merupakan ancaman besar baginya. Pada tahun 1511 M, Afonso de Albuquerque (pemimpin orang-orang Portugis) melakukan pelayaran dari Goa menuju Malaka. Portugis berhasil menguasai Malaka. Setelah Malaka ditaklukkan, Portugis menuju Maluku kawasan yang mempunyai “Kepulauan Rempah”.

Pada tahun 1522 M, Sultan Ternate Abu Lais atau Bayansirullah bekerja sama dengan Portugis dan membangun sebuah benteng di Ternate. Kerja sama ini tidak berjalan begitu lama, karena upaya Portugis melakukan Kristenisasi dan karena perilaku tidak sopan dari orang-orang Portugis sendiri pada umumnya. Setelah bangsa Portugis, datanglah orang-orang Belanda yang mewarisi aspirasi-aspirasi dan strategi Portugis. Orang-orang Belanda membawa organisasi, persenjataan, kapal-kapal, dan dukungan keuangan yang lebih baik serta kombinasi antara keberanian dan kekejaman yang sama. Tujuan kedatangan orang Belanda ke Indonesia yaitu mereka ingin mendapat keuntungan besar dengan berniaga, membeli rempah-rempah dengan harga rendah dan mereka ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia secara sendirian atau monopoli. Pada tahun 1595 M, ekspedisi Belanda yang pertama siap berlayar ke Hindia Timur sebanyak 4 buah kapal berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada tahun 1596 M, kapal-kapal tersebut tibadi Banten, pelabuhan lada yang terbesar di Jawa Barat.

Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC), pada tahun 1602 M, perhimpunan ini mendapatkan monopoli untuk berdagang ke Hindia Timur dan mempunyai hak-hak politik dan pengadilan. VOC bertujuan untuk menguasai perdagangan di Indonesia dengan sendirinya membangkitkan perlawanan perdagangan pribumi yang merasa langsung terancam kepentingannya. Sejak awal Belanda melihat bahwa dalam jaringan perdagangan di Indonesia bagian Barat, fungsi suatu tempat tersimpulnya jalur-jalur perdagangan sebagai pusat pemasaran strategis sangat penting, terbukti dari kedudukan Malaka, Johor, dan Banten.

Selain itu, Belanda juga berhasil menguasai hampir seluruh wilayah yang ada di Indonesia dengan menjalin hubungan dagang seperti dengan kerajaan melayu Jambi. Kerajaan Melayu Jambi berdiri pada tahun 1460 M dan berakhir pada tahun 1904 M penguasa atau pemimpin terakhir yaitu Sultan Thaha Saifuddin. Masuknya Belanda ke wilayah kerajaan Jambi pada tahun 1615 M pada masa kekuasaan Sultan Abdul Kahar dengan berlabuhnya 2 buah kapal dagang Belanda (Wapen's Van Amsterdam dan Middleburg) oleh Abraham Streck dengan maksud mendapatkan izin untuk mendirikan Loji Dagang di Muara Kumpeh. Dengan berdirinya loji Belandadi Muara Kumpeh, maka mulailah suatu babak baru dalam sejarah Jambi.

Kedatangan Belanda ke wilayah Jambi mendapatkan perlawanan dari rakyat Jambi, karena rakyat Jambi merasa bahwa Belanda tidak hanya memonopoli perdagangan semata tetapi juga sering mengadakan campur tangan dalam usaha pemerintahan dan juga dalam penggantian Sultan. Selain itu, juga dalam perselisihan dikalangan istana sendiri mereka memanfaatkan untuk memperkuat posisi mereka di daerah ini, sehingga akhirnya merekalah yang menentukan jalannya pemerintahan. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Jambi terhadap Belanda belum merupakan perlawanan bersenjata, melainkan berupa pemboikotan atas penjualan hasil bumi. Perlawanan ini berhasil, terbukti dengan ditutupnya kantor dagang Kompeni Belanda di Muara Kumpeh pada tahun 1623 M. Rasa tidak senang rakyat Jambi

terhadap Belanda diperlihatkan kembali pada tahun 1698 M yaitu dengan terbunuhnya Sybrandt Swart (kepala kantor kompeni Belanda di Muara Kumpeh) beserta stafnya oleh rakyat Jambi.

Untuk tetap menguasai Jambi, Belanda menggunakan politik pecah belah secara sistematis. Pelaksanaan politik pecah belah (*divide et impera*) bak pepatah Melayu “tak ubahnya seperti orang membelah sebatang bambu, bila salah satu ujung bambu telah retak/pecah, maka cepat atau lambat maka ujung bambu lainnya pasti akan pecah pula.” Belanda melihat ada pintu masuk paling strategis untuk memecah belah kesultanan Jambi melalui 2 jalur yakni: pertama, Terletak pada sistem pemerintahan dimana ada kekuasaan Sultan (raja) dan ada kekuasaan Pangeran Ratu (Putra Mahkota). Kedua, Terletak pada hubungan Jambi dengan kesultanan sekitarnya seperti Palembang dan Johor.

Meskipun pemerintahan Hindia Belanda sampai tahun 1833 M tidak mempunyai persoalan apapun dengan Jambi, namun rakyat Jambi tetap bersikap bermusuhan terhadap Belanda. Hal ini disebabkan karena sejak pertama kali Kolonial Belanda masuk ke daerah Jambi sudah merugikan masyarakat setempat. Semua yang dilakukan oleh Kolonial Belanda di Jambi intinya ialah merugikan masyarakat Jambi baik dari segi perekonomian maupun dari segi pemerintahan. Dalam ekspedisi melawan Kesultanan Palembang (1819-1821 M). Pada tahun 1833, Sultan Fachruddin (ayah Sultan Thaha Saifuddin) ketika menjadi Sultan Jambi juga mengadakan serangan terhadap kedudukan Belanda di Sarolangun Rawas. Belanda yang memiliki senjata yang lengkap membuat Sultan Fachruddin terpaksa menyerah dan ia diharuskan menandatangani sebuah perjanjian bertempat di Sungai Baung (Rawas) pada tanggal 4 Nopember 1833 yang isinya sebagai berikut: Negeri Jambi dikuasai dan dilindungi oleh negeri Belanda dan Negeri Belanda mempunyai hak untuk menduduki tempat-tempat yang diperkuat di daerah Jambi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode sejarah. Metode ini dimanfaatkan sebagai upaya merekonstruksi peristiwa atau kejadian masa lalu dengan menggunakan berbagai sumber, berupa data dan fakta yang dapat dipercaya dan sudah di buktikan dengan proses verifikasi sehingga menjadi sumber yang valid dan kredibel.

Adapun tahapan dalam metode penelitian sejarah terdapat empat tahapan. Tahap yang pertama yakni Heuristik atau dapat pula berarti mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang tersebar berupa catatan, kesaksian, dan fakta-fakta lain yang dapat memberikan penggambaran tentang sebuah peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Menurut Kuntowijoyo (Kuntowijoyo, 1995) heuristik merupakan keterampilan dalam mengumpulkan sumber. Pada tahap ini penulis menggunakan penelitian sumber pustaka yang didapatkan berupa arsip-arsip yang digunakan sebagai sumber primer yang didapatkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Museum Siginjei Jambi, dan juga website KTLIV yang diakses melalui website [delpher.nl](http://delpher.nl), juga didukung dengan sumber sekunder berupa buku, karya ilmiah berupa skripsi, thesis, dan disertasi, serta jurnal-jurnal ilmiah yang diakses di baik secara offline maupun online. Tahapan kedua merupakan kritik yang digunakan untuk menguji keshahihan dan keabsahan sumber yang telah dikumpulkan dengan kritik internal dan kritik eksternal. Dilanjutkan dengan tahap ketiga yakni interpretasi dari sumber-sumber yang telah disaring untuk kemudian dituangkan dalam tahap terakhir yakni historiografi atau penulisan sejarah.

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan metodologi strukturalistik yang dikembangkan oleh Christopher Lloyd. Metodologi ini menawarkan meneguhkan peranan individu sebagai faktor determinan dalam mentransformasi dan mereproduksi perubahan struktur sosial. Individu (atau sekelompok individu) inilah yang kemudian disebut sebagai ‘agent of change’. Menurut Lloyd, agency adalah kekuatan yang otonom dari struktur sosial, tetapi sekaligus juga merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang

untuk bertindak atas nama orang lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu (Lloyd, 1993). Metodologi strukturalistik ini menekankan perubahan sosial terjadi karena kelompok-kelompok sosial yang berasal dari struktur sosial itu sendiri (intern) mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan. Jika dikaitkan dalam penelitian ini, jelas Sultan Thaha sebagai agen yang berperan mendobrak struktur kekuatan hegemoni Belanda di tanah Jambi. Ketika beliau memiliki otoritas sebagai Sultan di tahun 1855, beliau memproklamasikan Jambi tidak lagi tunduk kepada Belanda. Didukung oleh para pengikutnya, Sultan Thaha melancarkan berbagai macam perlawanan yang salah satunya dengan menggunakan kekuatan tarik ulur untuk melawan Belanda. Melalui teori ini penulis akan mengungkap seberapa besar pengaruh Sultan Thaha sebagai *agent of change* berpengaruh pada perubahan sosial masyarakat Jambi ditinjau dari peran dan sosok beliau sebagai negosiator ulung untuk mempertahankan Jambi dari acaman kontrak Belanda hingga akhir hayat beliau pada 1904.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Diperkirakan Sultan Thaha lahir pada 1816, namun Elsbeth Locher Scholten menyebutkan bahwa beliau diperkirakan lahir pada 1833, yakni sebelum ayahnya, Sultan Muhammad Fakhrudin diangkat menjadi Sultan pada tahun 1834 (Locher-Scholten, 2004). Thaha bernama asli Thaha Jayadiningrat, atau sering dipanggil dengan Thaha Ningrat sebelum ia mengganti namanya setelah menempuh pendidikan di Aceh. Ibunda Thaha merupakan keturunan Arab yang memiliki pengaruh kuat terhadap kehidupan Thaha muda. Tidak seperti pangeran-pangeran di kerajaan Melayu lainnya, Thaha merupakan sosok yang telah mampu membaca dan menulis di usia dini dengan pengajaran bahasa melayu dan bahasa arab. Pengaruh keluarga ibunya yang besar lah yang menjadikan Thaha dapat melihat kondisi perpolitikan dunia Islam, khususnya di Melayu bahkan sebelum ia menjabat sebagai Sultan (Masjkuri, 1985). Kerabat Sultan Thaha yang merupakan keturunan Arab dan Turki merupakan tokoh-tokoh yang berpengaruh besar dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran agama Islam di Jambi. Seperti Said Idrus bin Hasan Al Jufri. Keluarga emigran Al-Jufri di Sumatera yang datang dari Hadramaut. Keluarga Al Jufri sangat terpandang, dimana pada tahun 1860-an Said Idrus menjadi juru bicara Kesultanan Jambi. Keluarga ini juga menjadi salah satu keluarga Arab terkaya dan memiliki basis yang besar di Palembang dan Singapura sehingga memiliki jaringan informasi yang sangat besar pada masa itu (Locher-Scholten, 2004).

Pada tahun 1834, Thaha berangkat melanjutkan pendidikan ke Aceh yang pada masa itu merupakan daerah di Nusantara yang memiliki pengaruh Islam yang kuat disamping daerah Minangkabau dan Banten. Aceh juga merupakan saudara jauh dari kesultanan Turki Usmani yang mana memiliki hubungan secara tidak langsung dengan raja-raja Jambi yang juga berasal dari Turki. Selain menempuh pendidikan agama Islam, Thaha juga berkesempatan untuk mempelajari ilmu politik dan militer dikarenakan kesultanan Aceh juga terkenal akan kekuatan militernya terutama selama berlangsungnya ketegangan antara Aceh dan Belanda. Selama pembelajaran singkat Thaha di Aceh yang hanya berlangsung selama 2 tahun, Thaha telah mampu membentuk pasukan “Sabilillah” yang dilatih oleh para pejuang-pejuang Aceh, yang nantinya akan menjadi cikal bakal Pasukan Komando di Jambi dalam usaha jihad melawan Belanda (Yulita dkk, 2019).

Selepas masa pendidikan di Aceh, Sultan Aceh saat itu Sultan Muhammad Syah mengadakan upacara pelantikan Thaha sebelum pulang ke Jambi. Thaha diberi gelar oleh sang Sultan dengan menyematkan nama “Syaifuddin” yang dalam bahasa Arab berarti Pedang Agama. Nama ini yang kemudian melekat hingga akhir hayat beliau mengingat bagaimana sikap penolakan dan upaya perlawanan beliau menghadapi Belanda dijadikan sebagai usaha Jihad Fisabilillah (berjuang di jalan Allah) dengan menyamakan Belanda dengan kaum kafir yang wajib diperangi. Sesampainya di Jambi, panggilan Raden Thaha Ningrat sepenuhnya menghilang dan berganti dengan Raden Thaha Syaifuddin (Noor, 2007).

Selama beliau memegang tampuk sebagai Sultan, Thaha terkenal dengan sosoknya yang sangat menentang semua kebijakan yang diberikan Belanda kepada Jambi. Sosok Sultan Thaha sebelum menjabat sebagai Sultan telah membangun hubungan dengan masyarakat setempat, terutama dengan kelompok yang bertolak belakang dengan Sultan sebelumnya (Fachruddin, 2008). Langkah awal yang dilakukan Thaha adalah membangun hubungan dengan para anggota istana, seperti kakaknya yakni Pangeran Diponegoro, dan dukungan dari pamannya Raden Tambun yang menguasai wilayah Tebo. Selanjutnya beliau secara sembunyi-sembunyi menyuplai logistik yang berupa persenjataan kepada pasukan-pasukan pemberontak di perbatasan Palembang Jambi.

Sedari kecil, Thaha terkenal dengan sosoknya yang rendah hati dan suka bergaul dengan rakyat. Salah satu hobi yang sering dilakukan beliau adalah berburu dan memancing di Sungai Batanghari. Hal ini juga yang disebutkan oleh Residen Palembang, P.T. Couperus, dalam bahasa sindirannya yang mengatakan jika sosok Thaha hanyalah seorang Sultan yang tidak mengurus pemerintah (tidak mau bernegosiasi dengan Belanda) dan lebih memilih memancing di pedalaman (Locher-Scholten, 2004).

Citra Thaha yang dikenal masyarakat Jambi sangat bertolak belakang dengan sosoknya di hadapan Belanda. Sultan dikenal sejak beliau merupakan sosok yang cerdas serta ketangkasan dan rendah hati terhadap semua kalangan. Pendidikan Islam yang telah beliau sejak usia dini juga membuat karakter beliau yang taat agama. Kedekatan beliau dengan rakyat dibuktikan dengan setiap daerah yang dikunjungi oleh Sang Sultan akan menyiapkan Kiding, yakni anyaman dari rotan bambu dan daun pandan yang berisi padi untuk dihadiahkan kepada Sultan (Masjkuri, 1985). Kecintaan rakyat ini digambarkan juga di dalam salako atau pantun Jambi yang berbunyi:

Asam Pati buah di hutan  
Batang Limau berduri-duri  
Habis Sayo mencari Sultan  
Sultan dilindungi matahari

Menurut laporan dari residen Palembang, P.F. Langing Tobias sebagai musuh diplomasi dari keresidenan Palembang menjelaskan bahwa Sultan Thaha merupakan sosok yang keras kepala dan menggebu-gebu. Tetapi Longing Tobias juga menjelaskan bahwa Sultan Thaha adalah sosok yang sangat tulus meskipun beliau sangat tidak percaya bahkan hingga membenci orang asing tetapi beliau menaruh kepercayaan yang besar kepada mereka yang telah membuktikan kejujurannya (Locher-Scholten, 2004). Sultan Thaha merupakan sosok yang berkomitmen absolut terhadap persahabatan.

### **Perubahan Arah Politik Batavia dan Jambi**

Pada tahun 1841, Sultan Muhammad Fakhruddin meninggal dunia dan digantikan oleh Pangeran Ratu dan juga Paman dari Thaha, yakni Sultan Abdul Rahman Nazaruddin. Thaha pun seharusnya diangkat posisinya menjadi Pangeran Ratu, tetapi beliau menolak hingga tahun 1854 sebelum ia menerima posisi tersebut. Kemungkinan terbesar adalah adanya campur tangan Belanda yang telah mewaspadai Thaha jika menduduki posisi Pangeran Ratu, dikarenakan posisi Pangeran Ratu yang sangat politis bermakna Pangeran mahkota yang akan menjadi Sultan selanjutnya sehingga ditakutkan konflik internal semakin meluas di Kesultanan Jambi. Kemungkinan kedua yakni ketidakcocokan pandangan politis antara Sultan Nazaruddin yang lebih berpihak pada Belanda karena bantuan tahunan yang diberikan oleh Belanda kepada Sultan (f 6000-8000 per tahun) dan kondisi Kesultanan Jambi yang miskin (Locher-Scholten, 2004). Terdapat pendapat juga yang mengatakan bahwa Thaha sibuk mengumpulkan dukungan di seluruh penjuru Jambi, termasuk menkonsolidasi dukungan dari salah satu pamannya yang

berselisih dengan Sultan Nazaruddin yakni Raden Tambun yang mendominasi kekuasaan di Jambi bagian hilir.

Pergerakan Thaha pada saat ini juga merasakan perubahan yang terjadi di Batavia. Salah satunya adalah pergerakan Residen Palembang yang mengerahkan kekuatan militer di perbatasan Palembang-Jambi. Selain itu, semasa Sultan Nazaruddin menjadi Sultan, Jambi menghadapi konflik internal dikarenakan Sultan Nazaruddin memiliki kecondongan dalam membangun hubungan dengan Belanda. Posisi Nazaruddin sebagai Sultan banyak ditentang oleh berbagai kalangan, yang mana saat itu ia berkeinginan untuk melepaskan benteng di Muara Kumpeh kepada Belanda. Residen Belanda saat itu, W. De Kock, menyebutkan bahwa ia (Nazaruddin) pasti akan di bunuh oleh orang-orangnya sendiri jika sempat melepaskan Benteng Muara Kumpeh kepada Belanda.

Semasa pemerintahan Sultan Nazaruddin, Belanda memanfaatkan kuasa pemerintahannya dalam pembatasan otoritas penguasa lokal dalam menjalankan pemerintahannya. Salah satu contohnya ialah Belanda hendak menghentikan aktivitas Benteng Muara Kumpeh dan lebih memfokuskan ke Musi Sungai Rawas (Palembang) yang menyebabkan Sultan Nazaruddin harus memohon ke Residen Palembang untuk menyampaikan ke Batavia agar menimbang kembali kebijakan tersebut karena dampaknya internal yang hebat di Kesultanan Jambi.

Disisi lain perhatian Pemerintah Pusat Hindia Belanda di Batavia mulai terfokus pada otoritas penguasa lokal di Nusantara termasuk Jambi, terutama sejak di tandatanganinya Traktat London 1824 (Wright, 1967). Jambi, meskipun telah menandatangani kontrak yang mengakui superioritas Belanda pada Perjanjian Sungai Baung 1833, namun secara eksplisit dalam kontrak belum terdapat kata-kata yang menunjukkan Jambi tunduk dan patuh dalam pemerintahan Hindia Belanda sehingga Batavia mempertimbangkan untuk merevisi dan memperbaharui isi dari kontrak.

Posisi Inggris yang telah menguasai Singapura pada tahun 1819 mempunyai pengaruh besar pada perdagangan di Selat Malaka. Meskipun Traktat London telah di tandatangi pada 1824, namun dalam perjanjian tersebut nama Jambi tidak termasuk didalamnya sehingga perdagangan Inggris di Muara Kumpeh tetap berlangsung dan tidak melawan kontrak (Wright, 1967). Ini menjadi kekhawatiran Belanda akan otoritasnya di Jambi terutama Muara Kumpeh yang posisinya sebagai salah satu pusat perdagangan bebas di Malaka.

Namun konflik kepentingan Belanda dan Inggris tidak berlangsung lama. Pada tahun 1841, James Brooke berhasil mendapatkan otoritas Sultan di Borneo sehingga Raja William II mau melonggarkan sejumlah persengketaan otoritas antara Inggris dan Belanda, termasuk didalamnya Jambi untuk diserahkan kepada Belanda. Di mata dunia luar Jambi menjadi milik Belanda, tetapi pemerintah Batavia masih melihat Jambi sebagai daerah pinggir sehingga pembaharuan kontrak dan juga inspeksi ke daerah Jambi masih tertunda (Locher-Scholten, 2004). Hal ini dikarenakan Jambi merupakan wilayah yang dianggap lemah dengan permasalahan bajak laut dan perselisihan internal yang tidak kunjung usai, sehingga Batavia lebih mementingkan memenangkan otoritasnya di Aceh.

Sebagai oposisi dari Sultan Nazaruddin, Thaha memanfaatkan konflik antara kepentingan Inggris dan Belanda di Muara Kumpeh untuk diam-diam membentuk pasukan militer dan mencari bantuan persenjataan dari Inggris di Singapura. Ia juga memberikan bantuan kepada basis-basis rakyat Palembang yang memberontak di daerah Komerling Ulu melalui wilayah Sarolangun. Hal ini meresahkan Residen Palembang yang merasa pemerintah Batavia tidak tegas menindaklanjuti Jambi. Pasukan Jambi memberikan pasokan-pasokan senjata yang didapat tanpa biaya beacukai karena posisi Muara Kumpeh sebagai tempat perdagangan bebas. Pemberontakan di Palembang pecah pada tahun 1849 yang membuat Residen Palembang terfokus untuk meredakan pemberontakan ini. Salah satunya adalah dengan membatasi pasokan-pasokan senjata yang berdatangan dari Jambi. Alhasil Residen Palembang hanya bisa membujuk Sultan Nazaruddin



untuk menghentikan impor senjata sesuai kebijakan dengan Batavia yang telah disepakati (Veth, 1882).

Pada tahun 1854, Thaha menjabat sebagai Pangeran Ratu setelah dibujuk oleh pamannya Raden Tambun yang menjabat sebagai Panembahan dan Susuhan (dewan penasihat Sultan) untuk menerima lencana jabatannya sebagai Pangeran Ratu. Tak berselang lama setelah penobatannya, pada tahun 1855, Sultan Nazaruddin meninggal dunia sehingga dinobatkannya Raden Thaha Syaifuddin sebagai Sultan baru.

### **Strategi Sultan Thaha Melawan Belanda**

Seperti halnya apa yang dilakukan oleh sultan-sultan sebelumnya, setelah Sultan Nazaruddin wafat, Sultan Thaha hanya menginformasikan kepada Batavia tentang pergantian Sultan baru. Namun disebutkan juga sejak tahun 1855 Thaha telah menunjukkan permusuhan dengan Belanda dengan menolak untuk mengakui Perjanjian Sungai Baung 1833 yang telah ditandatangani oleh ayahnya beserta perjanjian-perjanjian yang mengikutinya.

Setelah bertahtanya Sultan Thaha dan datangnya pemberitahuan pergantian Sultan di Jambi, Belanda yang sejak tahun 1847 memperbaharui kontrak dengan para penguasa lokal di Nusantara, mengajukan pembaharuan kontrak kepada Sultan Jambi melalui perwakilannya di Residen Palembang. Pembaharuan kontrak ini dikarenakan adanya pemberitahuan kepada otoritas Hindia Belanda untuk memasukkan poin-poin didalam kontrak yang melarang Sultan dan penguasa daerah untuk menerima surat dan hadiah dari pihak asing tanpa persetujuan Belanda. Tetapi dikarenakan perlu revisi ulang kontrak, perwakilan Belanda baru tiba ke Jambi pada akhir tahun 1857.

Pada tahun 1857, Sultan Thaha telah merasakan adanya perubahan arah politik dari Batavia ke Jambi, sehingga beliau mempersiapkan rencana-rencana cadangan sebelum kedatangan Belanda di tanah Jambi. Langkah awal yang dilakukan Sultan Thaha adalah mengirim Pangeran Ratu yang menjabat saat itu, Raden Martaningrat untuk pergi ke Singapura alih-alih sebagai perwakilan dagang, Raden Martaningrat ditugaskan untuk mengirimkan pesan diplomatik ke Kesultanan Turki Usmani tanpa sepengetahuan para pejabat istana. Pesan tersebut berisikan bahwa Kesultanan Jambi berada dibawah kepemimpinan Sultan Thaha Syaifuddin dan tidak ada kekuatan luar yang memiliki hak atas Jambi. Isi pesan tersebut mengisyaratkan permintaan bantuan Kesultanan Jambi terhadap Turki serta mengakui Jambi sebagai vasal dari Turki (Lindayanti dkk, ).

Keputusan yang diambil oleh Sultan Thaha ini merupakan salah satu ciri khas kesultanan Islam yang ada di Melayu dimana para Sultan memiliki hubungan yang kuat dengan kesultanan Turki. Hubungan ini dapat dilihat pada abad ke-16 Turki merupakan salah satu kekuatan yang dinilai sebagai musuh dari kekuatan-kekuatan kafir atau Eropa pada saat itu. Seperti halnya dapat ditemukan di tradisi Aceh di mana Aceh mengakui keunggulan Turki dan telah mengirimkan beberapa delegasinya untuk menetap di Turki (Reid, 1967).

Elsbeth Locher-Scholten membagi tiga fase awal pemberontakan Sultan Thaha terhadap Otoritas Belanda. Sejak Thaha memberikan pemberitahuan pergantian Sultan pada tahun 1855 dan diterima di Batavia pada Maret 1856, Dewan Hindia Belanda melihat tidak cukupnya pernyataan tertulis Sultan mengakui otoritas Belanda atas Jambi, sehingga dibutuhkan kontrak baru yang direvisi dan mendesak Sultan baru untuk menyatakan sumpah setia terhadap Belanda. Proposal kontrak baru diajukan oleh Residen pada awal 1857, sehingga Perwakilan diplomasi yang diutus dari Residen Palembang, P.T Corperous dan Assistant Resident Storm van 's Gravesande, pada Oktober 1857 berangkat ke Jambi.

Kedatangan perwakilan Residen Palembang sebagai utusan diplomasi sayangnya tidak berbuah manis dikarenakan sikap Sang Sultan yang keras kepala menolak untuk menandatangani kontrak. Dalih Sultan Thaha pada perwakilan Belanda bahwa Jambi tidak pernah sekalipun melanggar kontrak sebelumnya (Kontrak Sungai Baung 1833 dan revisinya) sehingga tidak perlu

dilakukan pembaharuan kontrak. Sultan Thaha saat itu, meskipun telah dibujuk oleh dewan komite istana akan maksud kedatangan Belanda, telah menyadari maksud diterbitkan kontrak baru yang akan merugikan kedaulatan Jambi. Sultan Thaha pada saat itu, bahkan hingga akhir hayatnya, sangat terkenal dengan taktiknya untuk menjadi sosok yang sulit dipahami dan menghindari kontak sebanyak mungkin dengan Belanda. Sang Pangeran Ratu, Raden Martaningrat, yang dinilai lebih terbuka untuk melakukan perbincangan dan negosiasi sedang berada di Singapura yang berdalih sedang bertugas sebagai utusan perdagangan disana (Reid, 1967).

Fase kedua setelah kegagalan kontrak pertama, Storm van Gravesande memberikan beberapa masukan ke pemerintah Hindia Belanda untuk merevisi kontrak sehingga bisa diterima oleh Sultan. Masukan ini diterima sehingga revisi kontrak dilaksanakan meliputi pasal-pasal yang berkaitan dengan suksesi turun-temurun dan pasal yang melarang sultan mendirikan benteng tanpa izin pemerintah dapat dihapuskan, karena masyarakat Jambi tidak pernah membangun benteng sendiri di masa lalu, kecuali beberapa benteng yang tidak pernah selesai dibangun di dekat kraton. Pihak Belanda memperkirakan bahwa rakyat Jambi tidak akan sempat ataupun mampu membuat benteng untuk menghadapi Belanda dengan kekuatan mereka sekarang.

Disisi lain, Belanda hanya memfokuskan pengawasan di bidang perdagangan saja, mengingat keterbatasan staf Hindia Belanda di Jambi yang hanya berpusat pada aktifitas Muara Kumpeh. Sultan Thaha pada masa ini berfokus pada pengendalian dan mobilisasi orang-orang *Vreemde Oosterlingen* atau Orang Timur Asing yakni orang Arab dan Cina di Muara Kumpeh. Pada tahap ini sikap Belanda terhadap Sultan hanya mau melunak dengan perubahan beberapa poin dan klausa pasal kontrak, tetapi tidak merubah maksud dan tujuan inti dari kontrak itu sendiri.

Pada tahun 1858, pemberitahuan untuk pembaharuan kontrak beserta surat langsung dari Gubernur Jendral Hindia Belanda kembali disampaikan ke Keraton Jambi. Kali ini pemberitahuan tertulis disampaikan melalui Syarif Ali Al-Jufri sebagai perantara antara Belanda dan pihak Keraton karena sikapnya yang tidak menunjukkan permusuhan langsung dengan delegasi Belanda. Sultan Thaha hanya memberikan balasan berupa keinginannya untuk tetap mempertahankan kontrak Sungai Rawas yang telah ditandatangani oleh Sultan Fakhruddin sebelumnya. Secara tidak langsung Sultan Thaha tetap mempertahankan konsistensinya untuk menolak pembaharuan kontrak. Mendapati penolakan dari Sultan Thaha, tim Delegasi Belanda akhirnya berangkat menemui Sultan pada bulan Juni 1858. Pemimpin komunitas Arab menjadi perantara pada pertemuan ini. Sultan Thaha tetap mengulangi jawaban sebelumnya tentang mempertahankan kontrak terdahulu. Ia menyatakan meskipun sejatinya ia tidak ingin bermusuhan dengan pemerintah kolonial, tetapi ia tetap tidak bisa mengubah kontrak yang telah dibuat oleh ayahnya. Jika Jambi terpaksa harus ditundukkan dengan senjata, maka ia menganggap bahwa ia hanya tunduk terhadap takdir yang telah diberikan oleh Allah (Locher-Scholten, 2004). Mendengar titah sang Sultan, Pangeran Ratu dan semua pejabat istana Jambi, menyatakan setuju dengan keputusan mutlak sang Sultan bahwa tidak ada negosiasi untuk pembaharuan kontrak di Jambi. Tim delegasi yang dikirimkan pemerintah Hindia Belanda pun tidak bisa berbuat apa-apa sehingga mereka kembali ke Muara Kumpeh, namun dalam perjalanannya di Sungai Batanghari, mereka dilempari batu oleh perempuan dan anak-anak yang mencela dengan kata kafir kepada delegasi Belanda tersebut (Ariyansa, 2021).

Fase ketiga sekembalinya tim delegasi Belanda, pemerintah Hindia Belanda mulai menempatkan sosok Sultan Thaha sebagai sultan yang memiliki kemampuan negosiator ulung dan mempertimbangkan kembali bagaimana sosok Thaha berdasarkan laporan-laporan yang telah diterima sebelumnya. Disini Belanda mulai mengakui kelalaian mereka yang menilai Thaha sebagai seorang Sultan yang kurang kompeten, serta Kesultanan Jambi yang dianggap sebagai pemerintahan yang lemah dikarenakan rakyatnya yang tidak mempunyai semangat untuk berperang. Serangan pertama terjadi pada 6 September 1858 dipimpin oleh Mayor Van Legen

yang berlokasi di Muara Kumpeh. Pasukan Belanda dengan keunggulan persenjataan dan mobilitas tempurnya dengan mudah mengalahkan rakyat Jambi yang hanya berbekal senjata bayonet dan kampung-kampung siaga sebagai benteng pertahanan (Leirissa dkk, 1983). Pasukan Belanda mengepung Keraton Jambi dari tiga arah, yakni pasukan laut yang menggunakan kapal berisikan senjata berangkat dari Muara Kumpeh via Sungai Batanghari, pasukan infanteri yang berangkat melalui pesisir Sungai Batanghari, dan Pasukan darat yang berangkat dari Bayunglencir menuju Jambi. Terdapat ratusan korban jiwa dari pihak Jambi serta di tawannya sejumlah pemangku adat dan pejabat keraton (Yulianti dkk, 2019). Sang Sultan beserta kerabatnya berhasil mengamankan diri ke Muara Tembesi daerah hilir Jambi meskipun akhirnya Kraton Jambi berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Alhasil kemenangan mutlak Belanda ini menghantarkan jalan bagi Belanda untuk menjatuhkan kekuasaan Thaha sebagai Sultan Jambi.

Belanda kemudian melancarkan taktik Pecah Belah, atau yang juga dikenal sebagai strategi Pecah Bambu, yakni menunjuk Sultan baru untuk dijadikan Sultan Boneka dibawah kekuasaan Belanda (Yulianti dkk, 2019). Belanda mengangkat Panembahan Prabu sebagai Sultan dengan gelar Sultan Ahmad Nazaruddin. Namun meskipun Belanda menunjuk Sultan baru, tetapi otoritas “raja” di kerajaan-kerajaan Melayu berbeda dikarenakan raja memimpin atas rakyat sebagai subjeknya bukan teritori wilayah. Kekuasaan raja diakui salah satunya dengan kepemilikan pusaka atau regalia, yang mana pada kasus Sultan Thaha beliau membawa Keris Siginjai sebagai bentuk legalitas beliau sebagai Sultan (Locher-Scholten, 2004). Sehingga keberadaan Sultan, dimanapun ia berada, tetap diakui serta harus ditaati oleh rakyatnya.

Pecahnya kekuasaan antara Sultan Thaha yang saat itu mengamankan diri di daerah hilir, dan kekuasaan Sultan baru yang menempati keraton dan huluan Jambi, mengakibatkan terpecahnya kekuatan dalam keluarga kerajaan. Hal ini yang diharapkan oleh Belanda dengan mengadu domba masalah internal istana Jambi agar mereka dapat menguasai Jambi secara utuh.

Meskipun seperti halnya di kerajaan-kerajaan lain Belanda menggunakan taktik Pecah Bambu atau adu domba untuk menguasai wilayah di Nusantara, namun untuk kasus Jambi Belanda terkesan tarik ulur dengan memfokuskan pada masalah internal kerajaan daripada menaklukkan total. Hal ini disebabkan beberapa alasan, diantaranya; (1) Jambi baru menjadi subjek penguasaan Belanda setelah Belanda bersitegang dengan Inggris tentang batas wilayah, terutama sejak jatuhnya Borneo di tangan Inggris dan intervensi Amerika di Sumatera, (2) Jambi merupakan kerajaan kecil yang memiliki sedikit kekuatan dan sering jatuh menjadi vasal dari kerajaan-kerajaan besar lainnya seperti Pagaruyung dan Aceh (3) Rakyat Jambi tidak pernah melakukan pemberontakan dalam skala besar terhadap Belanda (4) Staf Belanda yang berada di Jambi sedikit jumlahnya karena perhatian Belanda di Jambi baru sebatas perdagangan di Muara Kumpeh, dan (5) Pasca penaklukan Kraton Jambi dan Muara Kumpeh pada 1858, Belanda lebih memfokuskan penaklukan di Gorontalo dan Bone, sehingga perhatian untuk menaklukkan Sultan Thaha di Jambi terabaikan (Locher-Scholten, 2004).

Pasca diturunkannya Sultan Thaha, Belanda tidak berusaha menuntut atau mencampuri urusan dibagian hilir Jambi. Belanda sudah puas dengan menguasai daerah pesisir huluan yang merupakan pusat dari aktivitas perniagaan Jambi. Mereka mempertahankan pos-pos militer serta menempatkan beberapa stafnya di daerah Muara Kumpeh, Muara Tungkal, dan Muara Sabak (Amran, 2018). Disini Belanda sejatinya belum mengetahui jika pergantian Sultan saja tidak dapat menjamin kepatuhan dari para jenang dan pemangku adat di daerah pedalaman dikarenakan ketidaktahuan mereka akan karakteristik kepemimpinan Melayu, sama seperti halnya yang terjadi di Aceh.

Terlepas dari itu, peran Thaha dalam merebut simpati rakyat juga menjadi sorotan penting pasca jatuhnya Kraton Jambi. Meskipun kekuasaan Jambi terbagi dua antara hilir dan hulu, namun tidak ada perubahan signifikan dalam hierarki kekuasaan dan kepatuhan terhadap Sultan Thaha. Di daerah hilir Jambi, dengan berpusat di Muara Tembesi, Sultan Thaha tetap berkuasa.

Bahkan dikabarkan Sultan baru yang ditunjuk oleh Belanda juga saling bekerja sama dengan mengalirkan sebagian dana untuk Sultan kepada Sultan Thaha serta saling bertukar informasi. Sultan Thaha juga mengembangkan pasukan-pasukan komando dengan mendatangkan pelatih dari Aceh. Bahkan karena kuatnya pengaruh Sultan Thaha, rakyat Jambi sempat memberikan gelar kepada Sultan Nazaruddin sebagai Sultan Baring atau Sultan yang tiduran saja karena memang tidak ada perubahan dalam masa kekuasaannya. Diberitakan pada tahun 1860, pergerakan Sultan di pedalaman Jambi masih aktif seperti menghalangi transportasi pengiriman hewan ternak, gading dan sejumlah komoditas lain, dari Jambi ke Rawas (Amran, 2018).

Pada masa ini pergerakan Sultan Thaha berlangsung secara sembunyi-sembunyi dan berpindah-pindah dikarenakan Belanda mencoba membatasi akses Sultan Thaha seperti menutup akses di daerah Tabir, melakukan pendekatan kepada kepala dusun dan kampung-kampung, serta memburon dan menangkap para pengikut dan kerabat Sultan Thaha. Residen Pyrus van der Hoeven yang mencoba mengadakan ekspedisi ilmiah di pedalaman Jambi pada tahun 1878 namun gagal akibat banyaknya penyerangan yang dilakukan oleh rakyat Jambi yang dilakukan secara gerilya (Veth, 1882).

Aksi-aksi gerilya yang dilakukan oleh Sultan Thaha dan para pengikutnya terus berlangsung hingga wafatnya Sultan Ahmad Nazaruddin pada tahun 1881. Pangeran Ratu Martaningrat yang menjabat saat itu naik menjadi Sultan Jambi yang bergelar Sultan Mahiluddin. Diangkatnya Martaningrat ini juga ditujukan untuk membujuk Sultan Thaha agar mau berdamai dengan Belanda. Sayangnya kekuasaan Sultan Mahiluddin tidak berlangsung lama karena beliau wafat pada tahun 1885.

Sepeninggal Sultan Mahiluddin, pergerakan gerilya Sultan Thaha semakin tampak di permukaan. Pasukan Sabilillah bentukan Thaha telah berkembang pesat selama dua dekade terakhir. Bermula dengan penyerangan kota Jambi pada Agustus 1885 yang dipimpin oleh Pangeran Anom dan Pangeran Kusin, pasukan-pasukan ini terus mengincar pos-pos penjagaan Belanda yang tersebar di Jambi, seperti penyerangan pos Belanda di muara Sabak dengan meyerabotase Kapal Gubernemen "Sampit", serta menjarah peralatan senjata didalamnya (Ariyansa, 2021).

Pada tahun 1888, Sultan Thaha mulai bertindak terang-terangan dengan mempersiapkan pemerintahan baru di Muara Tembesi yang menjadi daerah kunci daerah huluan Batanghari dikarenakan posisinya yang strategis. Sultan Thaha mulai menyiapkan pasukan-pasukan untuk menyerang pos-pos penjagaan Belanda. Pada masa ini Sultan Thaha yang sudah lanjut usia, kepercayaan rakyat terhadap Sultan Thaha meningkat dengan menganggap sosok beliau adalah Sultan Keramat. Pasukan Sabilillah yang terkumpul diperkirakan mencapai 20.000 orang (Masjkuri, 1985). Akibat serangan-serangan masif yang dilakukan oleh para pengikut Thaha, pihak Belanda akhirnya memutuskan bahwa Sultan Thaha harus ditundukkan baik dengan dipaksa untuk tunduk terhadap Belanda atau harus dibinasakan.

Pada tahun 1897, Sultan Thaha mulai membentuk komando militer, terutama untuk persiapan perang di Muara Tembesi, dengan Panglima Tertinggi dipegang Oleh Sultan Thaha dan wakil komando di tangan Pangeran Diponegoro. Dibawahnya ditunjuk panglima-panglima medan pertempuran yang bergelar Imam Perang yang memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan perang di wilayahnya masing-masing mengingat kondisi Sultan Thaha yang semakin tua. Serangan-serangan untuk mempertahankan Muara Tembesi terus berlangsung seperti pertempuran di Tanjung Gagak pada tahun 1898 yang banyak menimbulkan korban jiwa dikedua belah pihak (Ariyansa, 2021).

Muara Tembesi yang menjadi pusat komando Sultan Thaha berhasil ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1901. Kekalahan ini dikarenakan timpang kekuatan militer Belanda yang membawa pasukan lengkap mulai dari senjata, artileri, kapal-kapal perang, hingga pasukan zeni. Sementara pasukan Sabilillah dan rakyat Jambi hanya berbekal bedil dan senjata sederhana lainnya sehingga kekalahan pasukan Jambi memang sudah tidak terelakkan lagi.

Pasca jatuhnya Muara Tembesi ke tangan Belanda, kekuatan pasukan Jambi semakin merosot dikarenakan banyaknya benteng-benteng pertahanan rakyat yang ditaklukkan oleh Belanda serta keterbatasan akses untuk mendapatkan bantuan logistik yang saat itu banyak mengandalkan transportasi air yang merupakan jalur transportasi utama di Sumatera Tengah (Columbijn, 2005). Para imam perang serta kaki tangan dan pendukung militan Sultan Thaha juga semakin berkurang dikarenakan selain faktor usia yang sudah tua, pengejaran yang dilakukan Belanda semakin meluas ke huluan Jambi sehingga banyak yang tertangkap dan diasingkan keluar Jambi. Kerabat Sultan Thaha banyak yang dinimidi dan menjadi buronan sehingga posisi Sultan Thaha semakin terjepit.

Dengan tetap mengadakan perlawanan gerilya, Sultan Thaha selalu berpindah-pindah untuk menghindari pelacakan Belanda. Pada tahun 1903, Pangeran Diponegoro dan Raden Anom wafat sehingga Sultan Thaha telah kehilangan dukungan terbesarnya. Pada tahun 1904, Belanda menerima kabar dari intelejen mengenai posisi Sultan Thaha di Betung. Semua pasukan Belanda secara serentak diarahkan kesana, yangmana Sultan belum menyadari yang saat itu sedang berada di Rumah Besak Pematang Tanah Garo. Pertempuran tidak bisa dihindarkan. Pada tanggal 27 April 1904, Sultan Thaha Syaifuddin beserta para jenang dan pengikutnya gugur dengan gagah berani ditengah medan pertempuran setelah adu tembak dengan pasukan Belanda (Ariyansa, 2021). Bahkan hingga akhir hayat beliau, sumpah beliau untuk tidak tunduk terhadap Belanda tetap terlaksana. Desa Betung yang menjadi tempat tumpah darah sang Pahlawan ini kini dikenal sebagai Betung Berdarah.

## **SIMPULAN**

Sosok Sultan Thaha Syaifuddin merupakan sosok Sultan Jambi sangat melek dengan kondisi perpolitikan yang berputar di sekitar Jambi, terutama perubahan arus politik yang terjadi di Batavia. Untuk menghadapi kondisi dimana Jambi sangat tidak diuntungkan jika dibandingkan dengan kekuatan Belanda saat itu, Sultan Thaha tetap bersikukuh untuk tetap tidak tunduk dengan Belanda. Strategi yang diupayakan oleh beliau adalah sebisa mungkin meminimalisir kontak dengan perwakilan Belanda terutama dengan tawaran-tawaran menggiurkan yang diajukan Belanda supaya Sang Sultan mau menandatangani pembaharuan kontrak atas tanah Jambi.

Sultan Thaha awalnya tidak serta merta mengajukan permusuhan terbuka terhadap Belanda. Secara diam-diam beliau membangun hubungan diplomatis dengan Kesultanan Turki serta mengadakan hubungan dengan Inggris dan Amerika serta kerajaan-kerajaan Melayu lainnya untuk mengimbangi penetrasi Belanda semasa ia diangkat menjadi Sultan. Keteguhan beliau untuk tidak mengadakan kontrak ini juga didukung oleh para pengikutnya serta sebagian besar rakyat Jambi, sehingga Belanda yang telah mengadakan dua kali negosiasi dengan Sultan Thaha harus menurunkan kekuatan militer untuk menundukkan Sultan Thaha.

Sayangnya minimnya perhatian Belanda terhadap Jambi serta pengetahuan tentang hierarki kekuasaan di Melayu menjadikan Sultan Thaha yang meski telah dilengserkan oleh Belanda tetap menjadi sosok sultan di mata rakyat Jambi. Perjuangan beliau tidak redup meskipun secara administrasi beliau tidak menjabat sebagai Sultan. Pergerakan gerilya dan sembunyi-sembunyi menjadi strategi yang dilakukan Sultan Thaha untuk mengusik kekuatan Belanda di tanah Jambi. Setelah beberapa dekade melakukan perlawanan gerilya, Sultan Thaha mulai menggunakan perlawanan terbuka dengan Belanda. Meskipun terdapat perbandingan besar antara kekuatan rakyat Jambi dan pasukan militer Belanda, hingga akhir hayatnya, Sultan Thaha dengan gagah berani di medan perang menolak untuk tunduk terhadap Belanda.

## **DAFTAR PUSTAKA (TNR 12)**

Amran, Frieda, 2018. Pertemuan dengan Sultan Jambi di Doesoen Tengah. Dalam <http://kajanglako.com/id-6786-post-pertemuan-dengan-sultan-djambi-di-doesoen-tengah.html> diakses pada 14 Maret 2023

- Amran Frieda , 2018. Soetan Thaha di Hulu. Dalam <http://kajanglako.com/id-5375-post-soetan-taha-di-hulu.html> diakses pada 14 Maret 2023
- Ariyansa, 2021. Pemetaan Peperangan di Jambi Pada Masa Sultan Thaha Saifuddin Tahun 1855-1904. Jambi: UIN Sultan Thaha
- Colombijn, F. 2005. A Moving History of Middle Sumatra, 1600-1870. *Modern Asian Studies*, 39(1), 1–38. <https://www.jstor.org/stable/3876505>
- Kuntowijoyo. 1995. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang Budaya
- Lindayanti,dkk. 2014. Menyibak Sejarah Tanah Pilih Pusako Betuah. Jambi: Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Jambi.
- Llyod, Christopher, 1993. The Structures of History. Oxford: Blackwell Publishing.
- Locher-Scholten, E. (2004). Sumatran Sultanate And Colonial State: Jambi and the Rise of Dutch Imperialism, 1830-1907 (No. 37). SEAP Publications.
- Marsden,William F.R.S. 2016. Sejarah Sumatera. Jogjakarta :Penerbit Indoliterasi.
- Masjkuri. 1985. Sultan Thaha Saifuddin. Jakarta: Depdikbud Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Reid, Anthony. 1992. South-East Asia in The Age of Commers 1450-1680. New Haven London: Yale University Press.
- Reid, Anthony. 1967. Nineteenth Century Pan-Islam in Indonesia and Malaysia. *The Journal of Asian Studies*, Vol. 26 (2) pp. 267-283
- Saudagar, Fachrudin. 2008. Sultan Thaha Saifuddin Perang Tak Kenal Damai 1855- 1904. Jambi :Yayasan FORKKAT
- T. Noor, Junaidi. 2013. Mencari Jejak Sangkala Mengirik Pernik-Pernik Sejarah Jambi. Jambi: Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Budaya Jambi
- Yulita, O., Nofra, D., & Ahat, M. 2019. Perjuangan Sultan Thaha Saifuddin Dalam Menentang Kolonial Belanda Di Jambi (Tinjauan Historis 1855-1904 M). *Hadharah*. (1) 103-108
- R.Z. Leirisa, Anhar Gonggong, M. Sunjata Kardarmadja. 1983. Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialime di Jambi. Jakarta:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Proyek dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Wright, H. R. C. (1950). The Anglo-Dutch Dispute in the East, 1814-1824. *The Economic History Review*, 3(2), 229–239. <https://doi.org/10.2307/2590770>
- Veth, V.J., 1882. Reizen en Onderzoekingen der Sumatra-Expeditie, uitgerust door het Aardrijkskundig Genootschap, 1877-1879 . Jilid II. Leiden: EJ Brill.